

## DISINTEGRASI SOSIAL DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT TRANSISI

Oleh: Siti Irene Astuti D.<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Masyarakat Indonesia termasuk dalam masyarakat transisi, baik yang sedang bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern maupun masyarakat yang sedang ingin berubah dari sistem lama (orde baru) ke arah sistem masyarakat baru (masyarakat modern).

Proses perubahan sosial tidak hanya bergerak secara evolusioner tetapi cenderung ke arah revolusioner yang berakibat pada melemahnya tatanan sosial yang sudah mapan. Oleh karenanya, disorganisasi sosial merupakan fenomena yang terus berlangsung pada kehidupan suatu tertib sosial.

Upaya untuk membentuk tatanan sosial baru yang mampu menciptakan ketertiban sosial harus diupayakan oleh semua pihak. Keluarga mempunyai peran penting dalam proses penanaman nilai-nilai baru. Sementara itu, sekolah mempunyai peran strategis untuk membentuk anak-anak yang berkarakter dan berbudaya dan sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat Indonesia Baru..

Kata kunci : Perubahan sosial, disorganisasi sosial

### **Pendahuluan**

Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses perubahan sosial diberbagai aspek kehidupan. Perubahan sosial tersebut menyebabkan berbagai tatanan sosial yang selama ini sudah mapan berubah, sehingga berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat kita terus menunjukkan kompleksitasnya.

Masyarakat Indonesia yang masih berada pada kondisi transisional, baik dari pergerakan masyarakat tradisional ke masyarakat modern maupun dari pergerakan sistem masyarakat orde baru ke arah pembentukan masyarakat menuju Indonesia baru

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP UNY

terus menampakkan fenomena sosial ke arah dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik maupun gejala disorganisasi sosial yang dapat membawa bangsa ini ke arah disintegrasi bangsa.

Sementara itu, perjalanan bangsa menuju Indonesia Baru dihadapkan pada kekuatan-kekuatan global yang mengakibatkan suatu revolusi di dalam kehidupan manusia yang terkotak-kotak di dalam kehidupan ikatan bangsa negara, maupun di dalam ikatan budaya. (Tilaar, 1998;41).

Tak dapat dipungkiri bahwa gelombang globalisasi berdampak negatif dalam proses pembangunan bangsa, seperti halnya ancaman terhadap budaya bangsa, lunturnya identitas bangsa dan hilangnya kesadaran terhadap wawasan nusantara. Demikian halnya, pengaruh budaya global dapat menggoyahkan inti dari kehidupan bangsa atau hilangnya identitas bangsa. Lebih lanjut, suatu masyarakat dan bangsa akan kehilangan wawasannya sebagai suatu bangsa yang memiliki suatu wilayah apabila bangsa tersebut kehilangan identitasnya.

Tantangan untuk mewujudkan Indonesia Baru merupakan suatu kenyataan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya terstruktur agar cita-cita bangsa untuk dapat mewujudkan masyarakat madani sebagai bentuk dari Indonesia Baru dapat direalisasikan. Sementara itu, upaya untuk meredam berbagai konflik sosial yang terus berkembang pada proses perubahan sosial menjadikan bangsa ini perlu untuk membangun suatu tatanan nilai yang lebih kuat dari sebelumnya.

Oleh karenanya upaya untuk membangun bangsa ini kearah kehidupan yang lebih harmoni dan bermartabat sangat membutuhkan semua unsur bangsa ini untuk terlibat secara partisipatoris dalam pembentukan "*nation-building*" yang lebih berkarakter dan lebih kokoh menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Pendidikan bangsa yang berwawasan budaya Indonesia sangat diperlukan di dalam mengembangkan masyarakat Indonesia Baru di tengah arus globalisasi,

sehingga konflik-konflik yang terus berkembang di era perubahan sosial ini tidak mengarah pada kondisi bangsa yang terpecah-pecah.

Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang struktur masyarakat transisi dan problem sosial yang muncul pada masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Pada akhir tulisan ini akan dicoba untuk memberikan ulasan tentang peran keluarga dan sekolah dalam membentuk tatanan sosial yang lebih berbudaya di era masyarakat yang berkembang ke arah disorganisasi sosial sehingga cita-cita untuk membentuk masyarakat Indonesia Baru pun dapat tercapai.

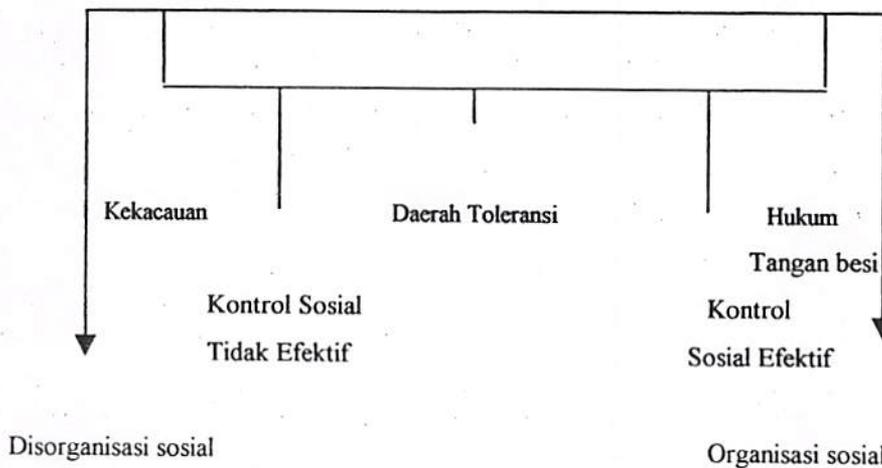
### **Struktur Masyarakat Indonesia Pada Era Transisi**

Pada era sekarang ini Indonesia benar-benar ada dalam kondisi masyarakat yang terus berubah. Perubahan sosial yang terjadi menunjukkan pergerakan yang tidak hanya bersifat evolusioner, tetapi mulai mengarah pada gerakan revolusioner. Perubahan sosial tidak hanya di pacu oleh kondisi krisis dimensional, tetapi juga di pacu oleh kondisi eksternal yakni era globalisasi yang mulai merasuk kesemua aspek kehidupan bangsa ini. Sebagai akibatnya, tatanan sosial pun ikut berubah secara revolusioner. Akibatnya, sendi-sendi kehidupan masyarakat pun mulai "retak", sementara bangunan baru belum siap dengan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh semua anggota masyarakat. Tak heran bahwa masalah-masalah yang berkembang pun sangat kompleks.

Perubahan sosial dalam analisis sosiologis menyangkut dorongan-dorongan perubahan sosial yang inheren dalam konstruksi tatanan sosial yang bersangkutan. Premis mencerminkan posisi masalah sosiologis, yang terus berkembang sejak awal abad XIX. Hal ini di rasakan juga oleh masyarakat Indonesia, bahwa tatanan sosial yang berupa keadaan transisi dan prasosial keadaan individual sampai ke kehidupan sosial seperti kelembagaan dan struktur masyarakat, mengalami perubahan (Munnandar, 1998;88). Perubahan dari masyarakat tradisi ke masyarakat transisi

adalah terjadinya konflik nilai. Keadaan konflik nilai akan menghasilkan sesuatu yang *polinormatif* dalam berbagai hal. Dalam hal ini mobilitas pada masyarakat tradisional cenderung menjadikan mobilitas sistematis. Artinya, mobilitas sosial, fisik dan jiwa berjalan bersama.

Landis menggambarkan bahwa masalah perubahan sosial dapat digambarkan sebagai berikut (Munandar 1998;89):



Pendapat Landis ini mengisyaratkan bahwa masyarakat secara normal dihasilkan dalam hubungan simbiosis sebagai bagian kerjasama yang saling ketergantungan dalam keseimbangan. Tetapi walaupun demikian, kondisi dan situasi dapat mengganggu keseimbangan dan menghasilkan disorganisasi sosial. Arti simbiosis organisasi kepada bermacam-macam ketergantungan fungsi, peranan pembagian dan fungsi yang membentuk dalam kehidupan dasar nonsimbiosis dan saling ketergantungan juga membantu masyarakat sebagai kekuatan untuk kohesi atau kekompakan sosial. Faktor-faktor budaya, kepercayaan agama, loyalitas dan adilnya hukum-hukum yang bersifat idiologis yang merupakan faktor nonmaterial yang berhasil bersama dalam masyarakat. (1998;89)

Mengacu pada pendapat Landis, jelas bahwa bangsa saat ini benar-benar menggambarkan tidak adanya simbiosis diantara berbagai elemen yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena kehidupan masyarakat Indonesia disebabkan oleh kedua hal. Pertama, masyarakat Indonesia sedang mencari "format" menuju Indonesia Baru., Kedua : belum berkembangnya simbiosis antara berbagai elemen yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial.

Membentuk struktur masyarakat baru bukanlah pekerjaan yang mudah, sama halnya tidak mudahnya menghindari dari proses perubahan sosial dan ikatan yang mampu merusak tatanan sosial yang sudah mapan. Oleh karenanya, simbiosis dan ikatan budaya adalah fundamental dan penting dalam menciptakan masyarakat bersama dan dalam mempertahankan integrasi sosial. Melalui proses sosialisasi, individu membutuhkan dan mengikuti pola-pola perilaku melalui simbiosis dan aspek budaya dalam masyarakat. Individu akan saling tergantung dan akan saling mengikuti nilai-nilai, sehingga mempunyai dampak terhadap perilaku dan hubungannya dengan masyarakat. Persoalannya adalah untuk Indonesia di masa sekarang, nilai-nilai apakah yang dapat digunakan sebagai nilai mempunyai keberlakuan secara universal, baik dalam skala nasional maupun skala global ?

Nilai-nilai budaya yang dapat berlaku secara nasional pun menunjukkan adanya pergeseran perannya. Jika dulu ada kecenderungan bahwa "nilai budaya Jawa" agak dominan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga, Pancasila yang sangat berperan untuk memayungi semua bentuk aktivitas hidup, untuk sementara ini mulai kurang menunjukkan perannya yang berarti lagi.

Dalam era reformasi dan era otonomi daerah, peran nilai daerah pun mulai dikembangkan dan diupayakan untuk dioptimalkan. Kecenderungan ini membawa dampak bahwa perlu dilakukan kajian tentang berbagai nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga upaya untuk membentuk tatanan sosial yang membudayakan budaya daerah dan membentuk perilaku simbiosis dari berbagai elemen masyarakat sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih terorganisir di tengah-tengah arus

perubahan sosial. Di sisi lain, upaya untuk mengembangkan tatanan sosial bangsa Indonesia pun dapat lebih dikembangkan. Ketika masyarakat daerah mampu mengembangkan tatanan sosial yang lebih mapan.

Dalam skala nasional, tatanan sosial harus dikembangkan dengan mengubah paradigma yang selama ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat kita yakni "kita harus selalu sama" menjadi "kita bisa hidup bersama dalam perbedaan". Perubahan ini mengandung kosekuensi bahwa dalam kehidupan masyarakat yang paling penting adalah bagaimana kita dapat *menghargai adanya perbedaan*. Hal ini adalah penting disosialisasikan dalam semua aspek kehidupan sosial, Karena dengan prinsip hidup yakni menghargai adanya perbedaan merupakan "lem perekat" bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses perubahan sosial yang cukup revolusioner. Bagi pembentukan ke arah Indonesia Baru, prinsip ini dapat menjadi media yang efektif bagi mereka yang masih berpikir pada sistem masyarakat lama dengan mereka yang terus bergerak menuju sistem masyarakat baru. Sementara, bagi berbagai elemen-elemen yang sedang di proses pembentukan simbiosis dapat meminimalkan berbagai perbedaan, berbagai kepentingan menuju satu kepentingan yang sama yakni menciptakan kehidupan bernegara yang aman dan sentosa.

#### **Disorganisasi Sosial : Tertib Sosial dalam Perspektif Teori**

Hal yang harus disadari oleh semua pihak bahwa kehidupan normal pun dimungkinkan terjadi perubahan dan disorganisasi sosial yang dapat menyebabkan :

1. Konflik norma, norma-norma dalam masyarakat dapat terjadi konflik dengan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola atau aspek lain dari kehidupan yang menyebabkan disorganisasi.
2. Tingkat perubahan budaya waktunya tidak sama, tetapi terjadi *culture lag* yaitu tidak samanya perkembangan anatar budaya materi dengan mentalnya orang yang menerima budaya materi tersebut.

3. Peraturan (sistem) yang tidak baik atau konflik antara manusia dengan lingkungannya (fisik, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain).

Disorganisasi sosial tersebut berkaitan dengan teori Tertib Sosial yang diterapkan dan bahkan menentukan arah perubahan sosialnya. Secara umum teori Tertib Sosial meliputi empat macam teori paksa (*coercion theory*), teori kepentingan (*cooperation or mutual interest theory*), teori konsensus (*consensus theory*) dan teori lambat (*continuity theory*). Sebagaimana dijelaskan oleh Mar'at, (Munandar, 1998:90-91), teori paksa berasumsi bahwa kekuasaan adalah sarana ampuh untuk mencapai tertib sosial. Teori ini menolak tentang realitas keanekaragaman sosial dan budaya. Keteraturan sosial diperoleh dari paksaan fisik dan moral. Paksaan moral akan diterima apabila nilai-nilainya diterima. Teori ini seringkali digunakan dengan dalih pembangunan yang mendesak. Akibat dari penerapan demikian, seringkali timbul gerakan-gerakan bawah tanah, persengkongkolan kutukan dan disorganisasi sosial, tertib semu dan ketegangan.

Tertib kepentingan berasumsi bahwa masyarakat dapat tertib karena ada kesepakatan sosial dan saling percaya. Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Teori ini hanya efektif bagi masyarakat pedesaan yang bersifat homogen. Tujuan tertib sosial kepentingan dapat tercapai apabila konsensus. Dampak teori ini adalah tertutupnya budaya kritik, sehingga aspirasi tidak tersalurkan. Keadaan ini menimbulkan perubahan sosial dengan mental budaya kurang menguntungkan, misalnya apatis.

Teori kesepakatan berasumsi bahwa tertib sosial dapat tercapai karena manusia terikat akan norma dan nilai, sehingga terjadi konsensus akan dipaksakan pada masyarakat yang bersifat pluralistik, seperti unsur-unsur primordial.

Teori Lambat menekankan perlunya suatu kondisi yang dapat mempertahankan *status quo*. Teori ini berasumsi bahwa tertib sosial dapat tercapai dengan memperlambat perjuangan unsur pokok kehidupan melalui isu-isu kecintaan, kesetiaan dan disiplin. Teori ini akan menimbulkan perubahan pada segi-segi

personalitas, seperti yang mementingkan segi formal tetapi tidak menyelesaikan masalah.

Melalui teori di atas, perlu dipikirkan upaya-upaya kongkrit bagi penyelesaian berbagai konflik sosial yang terus berlangsung di Indonesia. Penyelesaian konflik-konflik sosial adalah sangat perlu agar konflik tidak berkembang pada bentuk-bentuk pemecahan persatuan bangsa, tetapi fungsi konflik dapat dioptimalkan sebagai dinamisator kehidupan masyarakat.

Oleh karena, itu upaya untuk menekan konflik adalah dengan melakukan restrukturisasi tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Artinya, jika kita sepakat bersama untuk mengembangkan "nilai-nilai baru" yang melandasi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sudah saatnya dibentuk dan disosialisasikan ke dalam semua lapisan sosial, sehingga disorganisasi dapat dihindari. Untuk saat ini tampaknya bangsa ini perlu merumuskan visi dan misi bangsa ini sesuai dengan arah dinamika perubahan masyarakat.

Adapun pendekatan teori yang tampaknya relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia adalah melalui teori kepentingan dan kesempatan. Dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya pendekatan ini dapat digunakan untuk menciptakan tertib sosial. Lebih lanjut, teori paksaan pun cukup efektif untuk melakukan proses sosialisasi nilai-nilai baru, akan tetapi pendekatan ini masih perlu dipertimbangkan karena nilai-nilai demokrasi dan HAM, saat ini sedang menjadi satu wacana yang terus mengalir dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga unsur pemaksaan bisa jadi kurang cocok. Persoalannya adalah bagaimana mekanisme untuk menciptakan tertib sosial ?

Berbagai lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat mempunyai peran strategis untuk mensosialisasikan nilai-nilai baru yang diharapkan mampu menjadi landasan pokok bagi terciptanya masyarakat dengan tatanan sosial yang baru. Dalam hal ini, sejauh mana keluarga, sekolah mempunyai peran strategis untuk

menanamkan nilai-nilai baru yang sangat dibutuhkan sebagai fundamen kehidupan masyarakat ke depan.

### **Peran Keluarga dalam Membentuk Tatanan Sosial Baru**

Satu fenomena sosial yang terus berlangsung dalam kehidupan keluarga saat ini adalah terjadinya pergeseran berbagai fungsi-fungsi sosial keluarga. Dampak perubahan fungsi ini ternyata berakibat pada perubahan perilaku masyarakat secara luas. Salah satu lemahnya tatanan sosial adalah mulai melemahnya kontrol sosial oleh keluarga dan melemahnya berbagai fungsi-fungsi penting dari keluarga.

Meninjau kembali fungsi keluarga dari eksistensi kehidupan sosial para anggotanya tampaknya perlu dikaji kembali. Hal ini sangatlah beralasan, karena individu pada dasarnya tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Oleh karenanya, tidaklah bijak jika keluarga tidak lagi memikirkan fungsi-fungsi penting bagi perkembangan individu.

Berdasarkan pemikiran di atas jelas bahwa penanaman "nilai-nilai baru" yang diperlukan untuk membentuk tatanan sosial Indonesia Baru harus dimulai dari keluarga. Keluarga punya peran strategis dan berarti bagi kuatnya penanaman nilai-nilai baru. Jika saat ini bangsa Indonesia menginginkan suatu bentuk masyarakat Indonesia Baru maka nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang ingin dikembangkan secara efektif dimulai dari keluarga. Sementara itu metode yang dikembangkan oleh keluarga pun sudah saatnya disesuaikan dengan dinamikan perubahan masyarakat. Cara otoriter dalam banyak hal mulai dikurangi dan diusahakan untuk lebih demokratis.

Kehidupan masyarakat yang tampaknya ingin dikembangkan ke depan adalah masyarakat madani yang didasarkan pada empat ciri utama (Hikam dalam Tilaar, 1999), 1) **Kesukarelaan**. Artinya suatu masyarakat madani bukan merupakan suatu masyarakat paksaan atau indoktrinasi. Keanggotaan masyarakat madani adalah

keanggotaan dari pribadi yang bebas yang secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebab itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan sendirinya tanggung jawab pribadi sangat kuat karena diikat oleh keinginan bersama untuk mewujudkan keinginan tersebut.

2). **Keswasembadaan.** Artinya, keanggotaan yang sukarela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Dia tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, bahkan untuk dapat membantu sesama yang lain yang berkekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri tersebut adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat.

3) **Kemandirian tinggi terhadap negara.** Berkaitan dengan ciri yang kedua, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada pemerintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka, negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat.

4) **Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati.** Hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berlandaskan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Ciri-ciri tersebut di atas dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip hidup dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga proses menuju masyarakat Indonesia Baru dapat terealisasi.

Mengacu pada pemikiran teori tertib sosial, khususnya teori Kepentingan dan Kesepakatan, jelas bahwa konsep Indonesia Baru tidak akan dapat terwujudkan di dalam kehidupan masyarakat kita jika anggota-anggota masyarakat belum saling sepakat dan saling percaya serta memiliki keterikatan yang kuat tersebut. Nilai-nilai

dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip masyarakat madani pun perlu dikembangkan, sehingga semua anggota masyarakat merasa memiliki dan mendukung prinsip-prinsip tersebut agar tercipta suatu stabilitas sosial.

Persoalannya yang dihadapi oleh bangsa ini adalah bagaimana agar semua anggota masyarakat memiliki persamaan nilai tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalam masyarakat madani, merupakan suatu pekerjaan besar yang harus diperjuangkan oleh bangsa ini. Untuk itu, proses pendidikan bangsa yang membawa pada proses perubahan sistem masyarakat Indonesia adalah tugas semua anggota masyarakat. Jika tidak, proses perubahan menuju ke masyarakat Indonesia Baru justru akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan instabilitas sosial yang disebabkan masih adanya perbedaan nilai-nilai atau perbedaan persepsi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

#### **Peran Sekolah dalam Penanaman Nilai Budaya Baru.**

Kelangsungan pembangunan bangsa dapat terhambat karena terjadinya *polynormative*, banyak norma dan anomi (Munnandar, 1998:88). Keadaan ini tampaknya menjadi suatu kendala dari dunia pendidikan kita dalam membentuk karakter anak bangsa. Ada kecenderungan bahwa perubahan sosial yang diiringi dengan proses disorganisasi ini berdampak pada konflik antar pandangan yang memberikan pandangan pada orientasi yang sangat berlainan terhadap individu dalam bertindak.

Di sinilah, sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan anak bangsa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan anak sudah seharusnya melakukan reintrospeksi akan fungsinya. Meskipun ada satu hal yang tidak dapat dihindari bahwa sekolah juga punya peran dalam menciptakan "kesenjangan", tetapi sekolah tetap dinilai sebagai lembaga formal yang sangat efektif untuk membentuk karakter anak bangsa.

Pada era global, peran sekolah semakin berat karena dihadapkan pada situasi internal yang menunjukkan dinamika perubahan sosial dan tantangan eksternal yakni perubahan masyarakat menuju era global. Untuk itu diperlukan dinamika keseimbangan dalam kehidupan masyarakat agar proses pendidikan bangsa terus berlangsung dan berkembang sesuai dengan perubahan. Proses pendidikan pada dasarnya harus terus dikembangkan dengan tetap mengacu pada hakikat kebudayaan. Hal ini adalah penting karena tanpa meletakkan hakikat kebudayaan pada proses pendidikan akan menyebabkan hilangnya budaya bangsa dan identitas bangsa. Dengan berlandaskan pada hakikat kebudayaan, maka proses pendidikan bangsa akan lebih mengakar pada budaya bangsa. Sehingga proses pembangunan bangsa di tengah arus globalisasi tetap dapat mempertahankan identitas bangsa Indonesia.

Paradigma pendidikan yang diterapkan dalam membangun masyarakat madani adalah proses pendidikan yang mengakar pada budaya bangsa yang ditata dalam konteks siap menghadapi proses globalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam membangun masyarakat madani Indonesia meliputi (169-173) :

1. *Pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat*

Pendidikan **dari** masyarakat artinya bahwa pendidikan haruslah memberikan jawaban kepada kebutuhan dari masyarakat sendiri.

Pendidikan **oleh** masyarakat artinya bahwa masyarakat bukanlah obyek pendidikan yaitu untuk melaksanakan kemauan dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Tugas pemerintah di dalam pendidikan nasional adalah menjaga dan mengarahkan supaya tanggung jawab masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pendidikan **bersama-sama** masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri.

2. *Pendidikan didasarkan pada kebudayaan nasional yang bertumpu pada kebudayaan lokal*

Tugas pendidikan nasional adalah menghayati dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan lokal dan juga ikut membangun kebudayaan nasional.

3. *Proses pendidikan mencakup harmonisasi dan proses humanisasi.*

Di dalam proses homonisasi dimaksudkan pengembangan manusia sebagai makhluk hidup. Makhluk manusia harus dibesarkan agar supaya dia dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan biologis yang membutuhkan makanan bergizi, kebutuhan seks, kehidupan ekonomi, termasuk lapangan kerja sendiri. Dengan proses humanisasi manusia bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Proses homonisasi dan proses humanisasi merupakan suatu kesatuan yang terjadi di dalam kehidupan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur universal, partikular dan global. Unsur-unsur kebudayaan tersebut berada dan berkembang di dalam dimensi-dimensi spasial dan temporal. Dimensi spasial kebudayaan mengimplikasikan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang tidak berkebudayaan atau kebudayaan adalah milik dari suatu masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut terus berkembang di dalam dimensi waktu atau temporal artinya setiap kebudayaan mempunyai masa lalunya, masa kini, dan masa depan. Oleh sebab itu kebudayaan bersifat dinamis, terus berkembang.

4. *Pendidikan demokrasi*

Pendidikan demokrasi sebagai tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur :

- a. Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri.
- b. Manusia memerlukan kebebasan intelektual diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai kemampuan

intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan dirinya yakni dengan tidak melakukan diskriminasi atas dasar pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama kepada peserta didik.
- d. Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok.
- e. Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda
- f. Percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat lebih baik di masa depan.

Berdasarkan pemikiran di atas, sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai peran strategis untuk mengubah arah pendidikan Indonesia sesuai dengan proses perubahan masyarakat kita. Di samping itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai peran efektif untuk menanamkan nilai-nilai baru yang dibutuhkan untuk membentuk tatanan sosial yang baru. Sekolah dalam proses pendidikan pun perlu untuk bersikap responsif dan proaktif terhadap berbagai tuntutan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tuntutan masyarakat global. Kebijakan otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang perlu disikapi secara arif oleh pihak sekolah untuk lebih partisipatif mendorong proses pendidikan anak bangsa ke arah *out-put* pendidikan yang benar-benar berkualitas dan kompetitif.

Mengubah sistem pendidikan yang menjamin anak-anak didik lebih berkarakter, berbudaya dan bermoral serta berkualitas adalah tanggung jawab sekolah dan didukung oleh pihak-pihak lain yang terkait dalam proses pendidikan, seperti : keluarga, lingkungan masyarakat, peran media massa. Sebagai agen sosialisasi ke semua elemen yang terkait dalam proses pendidikan dan penanaman nilai-nilai budaya baru dalam upaya membentuk tatanan sosial yang baru harus dapat menciptakan simbiosis, sehingga proses perubahan yang terus berlangsung pada

masyarakat kita tidak menimbulkan disorganisasi sosial, apalagi sampai berkembang ke arah disorganisasi bangsa.

### **Penutup**

Perubahan sosial yang terus berlangsung membawa bangsa ini kepada struktur masyarakat yang tidak stabil dan ke arah disorganisasi sosial. Bagi Indonesia ini masyarakat bergerak ke arah masyarakat tradisional, baik dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern maupun dari masyarakat sistem "lama" ke pada masyarakat sistem baru (Indonesia Baru).

Pendekatan teori Kesepakatan dan Kepentingan merupakan pendekatan yang agak relevan untuk kondisi bangsa ini dalam upaya untuk menerapkan tertib sosial. Sehingga upaya untuk membentuk Indonesia Baru tidak diwarnai dengan berbagai konflik-konflik dan masalah sosial yang terus meningkat.

Keluarga mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai-nilai baru dan sekolah merupakan lembaga yang sangat strategis dan efektif untuk membentuk karakter anak bangsa yang berbudaya, bermoral dan berkualitas sesuai dengan tuntutan perubahan. Sekolah berperan untuk mengembangkan perilaku anak didik sesuai dengan tatanan sosial yang baru.

### **Daftar Pustaka**

- Soelaiman, Munnandar (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tilaar, HAR (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang : Tera Indonesia
- (1999). *Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Semiawan Conny. 1992. *Kurikulum Berdeferansiasi*. Jakarta: Grasindo.
- Semiawan Conny. 1995. *Perpektif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti
- Suyanto dan Djihat Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta.: Adicita Karya Nusa.
- Swassing RH. 1985. *Theaching Gifted Children and Adolescent*. Columbus: Ohio Charles E Merrill Publishing Company.
- Ward. P. 1980. *Deferensial Education of The Gifted*. Ventura. LA.